

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

United Nation meluncurkan 17 tujuan global yang sepakati pada tahun 2015 sebagai jawaban atas tantangan keberlanjutan global yang kompleks (Alamoush et al., 2021). Di antara 17 tujuan tersebut, yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030, daftar pertama yang disebutkan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana pun. Program ini dibuat sebagai upaya global untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan pendapatan pada tahun 2030. Tentunya hal ini sangat penting karena kemiskinan merupakan masalah yang meluas dan kompleks yang memengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemiskinan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individu, masyarakat, dan ekonomi, termasuk kesehatan yang buruk, akses terbatas ke pendidikan dan layanan penting lainnya, serta berkurangnya peluang ekonomi.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan kesejahteraan (Murjani, 2018). Kemiskinan pada awalnya didefinisikan sebagai fenomena ekonomi, suatu kondisi di mana pendapatan rumah tangga individu tidak memenuhi standar hidup dasar. Dengan perkembangan sosial ekonomi, definisi kemiskinan secara bertahap berubah dari kekurangan pendapatan ekonomi menjadi pengukuran multidimensi, termasuk kurangnya akses ke pendidikan, perawatan medis, perumahan, dan deprivasi sosial lainnya (Liu et al., 2020). Kemiskinan secara

umum mengacu pada situasi di mana sumber daya ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan absolut, di sisi lain, berarti ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan fundamental.

Bank Dunia mengeluarkan informasi statistik terkait kemiskinan, di mana saat ini, dari total jumlah penduduk di seluruh dunia, 700 juta individu diantaranya masih terjebak pada kemiskinan yang parah dengan pendapatan di bawah \$2,15 setiap harinya. Kemajuan terhenti di tengah pertumbuhan yang rendah, kemunduran akibat COVID-19, dan meningkatnya kerapuhan. Angka kemiskinan di negara-negara berpendapatan rendah lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Sekitar 3,5 miliar orang (44 persen dari populasi global) tetap miskin menurut standar yang lebih relevan untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas (\$6,85 per hari), dan angka individu yang hidup dengan penghasilan di bawah ambang ini hampir tidak mengalami perubahan sejak dekade 1990-an karena peningkatan jumlah penduduk (*World Bank*, 2024).

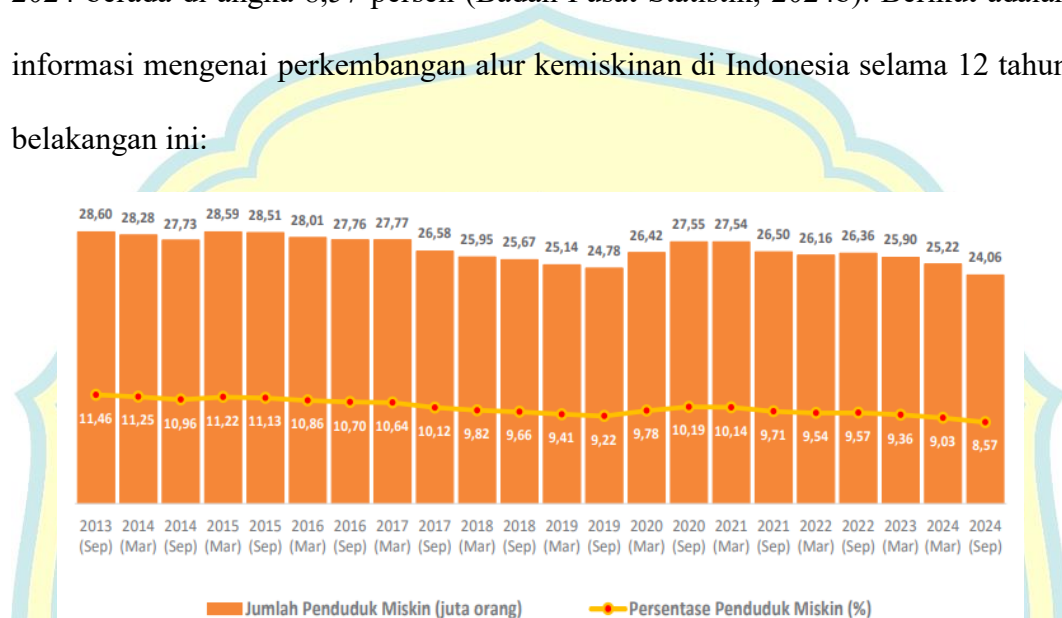
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk yang miskin bisa diartikan ketika seseorang ataupun keluarga tidak mampu untuk mencukupi segala kebutuhan pokok yang digunakan untuk meraih taraf kehidupan yang dibutuhkan (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018). BPS menggunakan pendekatan multidimensi untuk mengukur kemiskinan, dengan mempertimbangkan tidak hanya tingkat pendapatan tetapi juga berbagai indikator sosial yang mencerminkan kondisi kehidupan dan akses ke layanan penting. Referensi lembaga tersebut mencakup survei nasional dan data statistik yang memberikan wawasan tentang kemiskinan, karakteristik demografinya, dan

efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Indonesia adalah sebuah negara yang tersusun dari banyak pulau dan memiliki populasi yang sangat besar yang terdiri dari 34 provinsi. Termasuk negara dengan potensi SDA yang besar tersebar di seluruh daerahnya serta berada pada kedudukan geografis yang memberikan keunggulan strategis, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor, terutama dalam aspek ekonomi. Namun, tantangan yang terus dihadapi oleh negara ini adalah masalah kemiskinan.

Selama lima tahun belakangan ini, kondisi kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan mengalami telah menunjukkan penyusutan, didukung oleh pemulihan ekonomi yang stabil, perluasan bantuan sosial, dan peningkatan lapangan kerja pascapandemi. Berbagai program kesejahteraan pemerintah seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan subsidi layanan kesehatan telah membantu menstabilkan rumah tangga rentan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor manufaktur, jasa, dan digital juga berkontribusi pada perluasan peluang pendapatan, yang secara bertahap mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, kemajuan belum merata di seluruh wilayah. Daerah pedesaan terus mengalami ketimpangan kemiskinan karena adanya hambatan dalam jangkauan terhadap sarana, pendidikan, dan variasi dalam kegiatan ekonomi. Guncangan eksternal seperti kenaikan harga pangan, ketidakpastian ekonomi global, dan peristiwa terkait iklim juga terkadang memperlambat laju penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang belum berhasil ditangani secara menyeluruh oleh pemerintahan Indonesia. Jumlah Penduduk miskin di Indonesia menurut data statistik terbaru per September 2024 berjumlah 24,06 juta

orang atau sebesar 8,57 persen. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 1,16 juta dibandingkan dengan jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan pada periode sebelumnya yang tercatat sejumlah 25,22 juta. Presentase penduduk miskin Indonesia juga mengalami penurunan, dimana sebelumnya pada bulan September 2024 berada di angka 8,57 persen (Badan Pusat Statistik, 2024b). Berikut adalah informasi mengenai perkembangan alur kemiskinan di Indonesia selama 12 tahun belakangan ini:



Gambar 1.1 Fluktuasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Selama 12 Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sesuai dengan informasi di atas, populasi yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia menunjukkan perubahan yang tidak tetap. Terlihat bahwa antara September 2013 hingga September 2014, jumlah warga miskin di Indonesia berkurang menjadi 27,73 juta orang. Namun, antara September 2015 dan September 2016, jumlah tersebut kembali menurun, mencapai 27,76 juta jiwa. Peningkatan terjadi selama selang enam bulan setelahnya yang mencapai 27,77 juta jiwa, sebelum kembali menurun menjadi 24,78 juta jiwa pada September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2024e).

Perbedaan yang cukup signifikan diantara provinsi-provinsi di Indonesia terkait jumlah penduduk miskin. Namun, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di negara ini sangat patut diperhatikan; tiga dari sepuluh provinsi tersebut berada di pulau Jawa. Menurut data September 2024, Provinsi Jawa Timur, dengan 38.938.200 jiwa, menempati peringkat pertama dalam kemiskinan, Provinsi Jawa Barat, dengan 36.683.500 jiwa, menempati peringkat kedua, dan Provinsi Jawa Tengah, dengan 33.963.400 jiwa, menempati peringkat ketiga. Untuk data yang lebih rinci, lihat tabel di bawah ini:

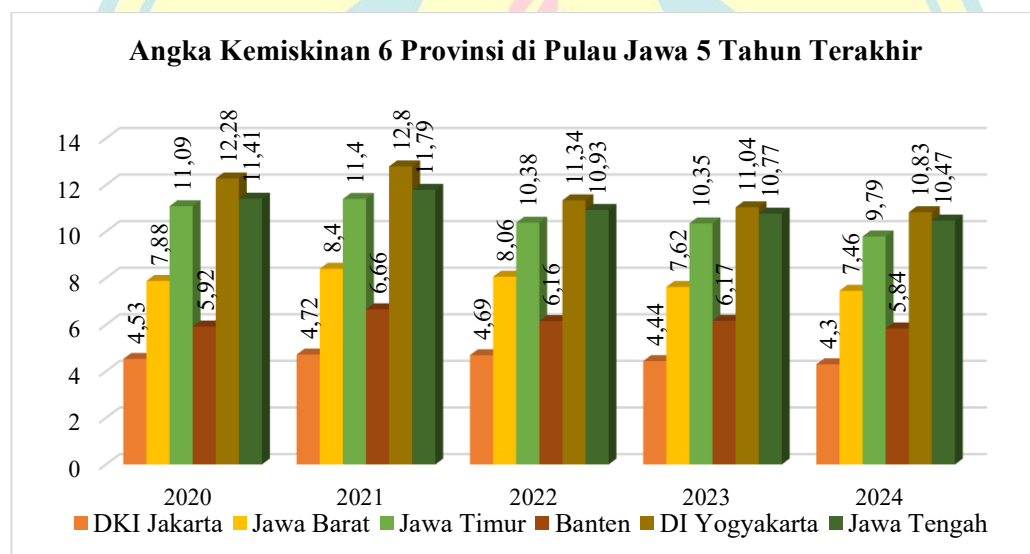


Gambar 1.2 10 Provinsi dengan Populasi Miskin Terbanyak Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Terdapat beberapa provinsi yang mempunyai jumlah penduduk dalam kategori miskin yang cukup besar. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat teratas dengan 38,9382 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan, Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 36,6835 juta jiwa, dan Provinsi Jawa Tengah di

peringkat ketiga dengan 33,9634 juta jiwa. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi Jawa lainnya, Provinsi Banten, juga bergabung bersama ketiga provinsi tersebut yang masuk sebagai peringkat kedelapan dengan 7,1896 juta jiwa. Provinsi Sumatera Utara yang duduk di peringkat keempat dengan 11,1092 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan, Provinsi Nusa Tenggara Timur di peringkat kelima dengan 11,0794 juta jiwa, Provinsi Sumatera Selatan di peringkat keenam dengan 9,4884 juta jiwa, Provinsi Aceh di peringkat kesembilan dengan 7,7749 juta jiwa, dan Provinsi Sulawesi Selatan di peringkat kesepuluh dengan 7,1177 juta jiwa.



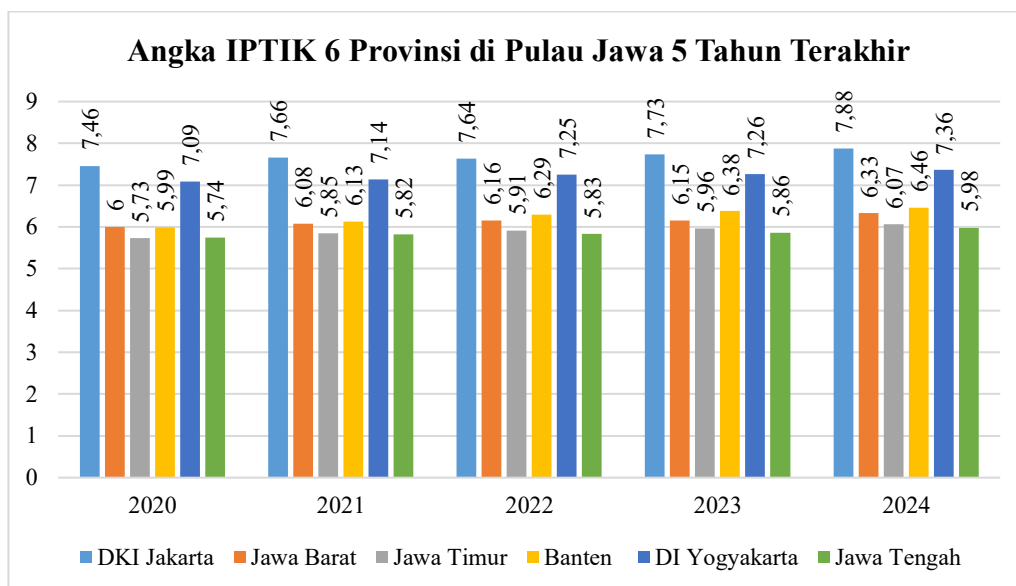
Gambar 1.3 Angka Kemiskinan 6 Provinsi di Pulau Jawa, 2020 - 2024

Sumber : (Statistik, 2024)

Seperti yang ditunjukkan grafik di atas, persentase kemiskinan tiga dari enam provinsi di Jawa relatif tinggi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Persentase kemiskinan tertinggi di tahun 2024 diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan angka 10,83%. Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan angka 10,47% diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan persentase kemiskinan di angka 9,79%. Persentase kemiskinan

selanjutnya berada di angka 7,46 % yang diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Dua provinsi yang mendapati persentase kemiskinan terendah diambil oleh Provinsi Banten pada angka 5,84% dan angka 4,3% diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Namun, analisis yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa persentase kemiskinan menghadapi perkembangan yang memiliki dampak pada saat pandemi COVID-19 yang akibatnya menyebabkan penurunan ekonomi dan memperburuk kemiskinan di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kemiskinan bukanlah fenomena alamiah, melainkan produk dari berbagai faktor, salah satunya adalah proses digitalisasi. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi hasil pembangunan modern adalah indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IPTIK). Perubahan-perubahan yang marak terjadi di era digital ini telah mengubah cara individu dan masyarakat mengakses informasi, berinteraksi secara ekonomi, dan terlibat dengan layanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi sebagai katalisator pengentasan kemiskinan dengan membuka jalur menuju pendidikan digital, peluang bisnis daring, teknologi keuangan, dan layanan *e-government*. Adanya perkembangan IPTIK juga memungkinkan pasar yang lebih efisien dan mengurangi biaya transaksi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Namun, tidak semua wilayah di Jawa memiliki tingkat kesiapan teknologi informasi dan komunikasi yang serupa.



Gambar 1.4 Angka IPTIK 6 Provinsi Pulau Jawa, 2020 – 2024

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024d)

ICT *Development Index* atau Angka IPTIK Indonesia tahun 2024 mencapai 6,02 dari nilai indeks 10. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori "sedang" dalam hal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi pertumbuhan indeks menunjukkan kemajuan dalam perluasan akses, penggunaan, dan kemampuan digital masyarakat. Di antara semua provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama sebagai penerima skor indeks IPTK tertinggi sebesar 7,88. Provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat kedua dengan skor indeks IPTIK sebesar 7,36. Empat provinsi lain di Pulau Jawa juga memiliki indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang relatif tinggi, yaitu Provinsi Jawa Barat (6,33), Provinsi Jawa Tengah (5,98), Provinsi Jawa Timur (6,07), dan Provinsi Banten (6,46).

Angka indeks yang menunjukkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki peranan krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan dengan memengaruhi keterjangkauan teknologi digital, peluang ekonomi, dan

pelayanan umum esensial. Wilayah yang memperoleh nilai IPTIK lebih tinggi biasanya menunjukkan angka kemiskinan yang lebih rendah karena infrastruktur digital yang kuat memungkinkan masyarakat mengakses pendidikan daring, layanan keuangan digital, *e-commerce*, dan program pemerintah secara lebih efektif. Hubungan yang lebih baik juga menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi ketidakmerataan informasi yang sering kali menyebabkan masyarakat dengan pendapatan rendah terjebak dalam situasi ekonomi yang stagnan. Di sisi lain, wilayah dengan tingkat teknologi informasi dan komunikasi yang rendah sering menghadapi risiko kemiskinan yang terus-menerus karena akses teknologi yang terbatas, keterampilan digital yang tidak memadai, dan tingkat partisipasi yang rendah dalam ekonomi digital modern.

Beberapa faktor dapat berdampak pada kemiskinan salah satunya adalah penanaman modal asing. Investasi asing merujuk pada aktivitas investasi yang dijalani oleh investor asing di negara tujuan dimana investasi yang dilakukan termuat investasi dengan modal asing sepenuhnya atau dalam kemitraan dengan investor lokal. Investasi langsung asing (FDI) merujuk pada transfer dana dari investor global ke negara tersebut untuk tujuan mendirikan atau mengembangkan usaha, membangun fasilitas, atau memperoleh aset dengan nilai jangka panjang (UU No. 25 Tahun 2007, 2007). PMA dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena tidak hanya membawa sumber daya keuangan tetapi juga transfer teknologi, keahlian manajerial, dan akses pasar global. Negara-negara biasanya bersaing untuk menarik investasi asing dengan menawarkan regulasi yang mendukung, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan memastikan stabilitas politik

dan ekonomi. Masuknya investasi asing langsung dalam jumlah besar biasanya menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi negara tersebut.

Tabel 1.1 Angka Investasi Asing pada 6 Provinsi di Pulau Jawa

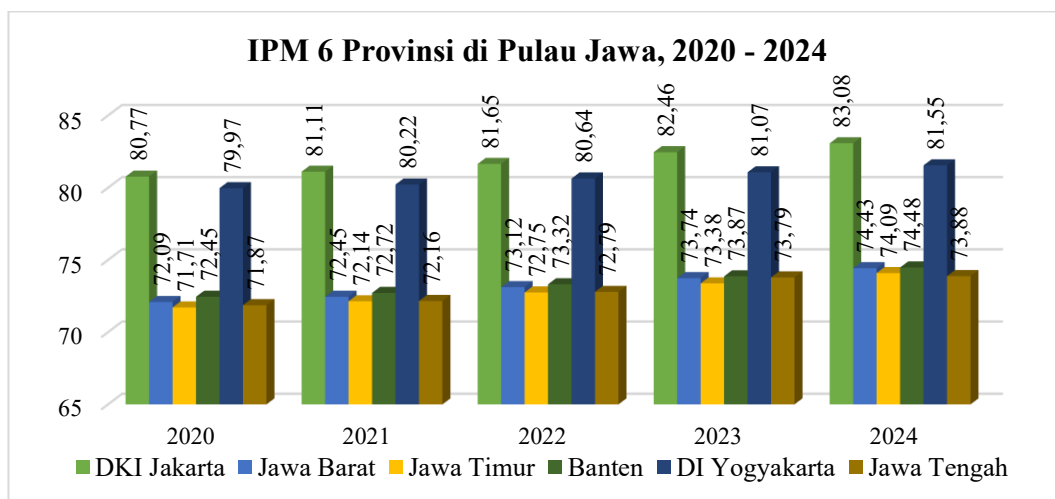
Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	3613262.5	3330567.7	3744070.1	4830021.5	7563411.5
Jawa Barat	4793707.2	5217691.3	6534450.1	8283746.1	9972328.2
Jawa Timur	1575459.8	1849172.6	3134043.2	4740978.2	3661076.8
Banten	2143559.2	2189967.2	3410682.1	4451586.5	3868168
DI Yogyakarta	9722.7	21813.6	113893.3	46008.4	35443.1
Jawa Tengah	1363635	1465939.3	2362039	1563663.6	2358034.8

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah oleh peneliti

Sepanjang tahun 2024, pencapaian investasi di Indonesia berhasil mencapai Rp1. 714,2 triliun, meningkat sebanyak 20,8% dibandingkan dengan tahun lalu dan melewati sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp1.650 triliun sebesar 103,9%. Pada tahun 2024, investasi asing langsung (FDI) akan terus menjadi jenis investasi yang dominan, mencapai Rp 900,2 triliun (52,5%), diikuti oleh investasi domestik langsung (DDI) sebesar Rp 814 triliun (47,5%) (Hilirasi/BKPM, 2025a). Investasi asing di Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai Rp 900,2 triliun (US\$55,33 miliar), meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi asing terbesar di Indonesia pada tahun 2024 terletak di Provinsi Jawa Barat dengan raihan investasi asing sebesar US\$ 9.972.328,2. Disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai investasi sebesar US\$ 7.563.411,5, di urutan ketiga terdapat Provinsi Jawa Timur perolehan investasi yang masuk sebanyak US\$ 3.661.076,8, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai investasi sebesar US\$ 2.358.034,8, Provinsi Banten dengan nilai investasi sebesar US\$ 386.816,8, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai investasi sebesar US\$ 35.443,1. (Hilirasi/BKPM, 2025b) .

Seperti yang kita lihat, investasi di Jawa secara konsisten mewakili tingkat investasi tertinggi di Indonesia, baik domestik maupun internasional. Tabel di atas menunjukkan bahwa investasi asing di Pulau Jawa melalui peningkatan yang cukup pesat. Diantara kenaikan tersebut, investasi asing di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Provinsi Jawa Barat memiliki investasi asing tertinggi di Pulau Jawa, mencapai US\$9.972.328,2 juta diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur.

Faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diartikan seperti tolak ukur statistik komprehensif untuk mengevaluasi capaian pembangunan suatu negara secara keseluruhan dan kesejahteraan penduduknya. Dikembangkan dibawah *United Nation Development Programme*, indeks ini terutama mempertimbangkan tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Dengan menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan menjadi satu indikator, IPM telah menjadi alat penting untuk memahami berbagai aspek kemiskinan. IPM yang lebih tinggi di suatu negara biasanya menunjukkan bahwa warganya memiliki kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang sudah maju, serta keterjangkauan terhadap sumber daya ekonomi yang meluas.



Gambar 1.5 Angka IPM 6 Provinsi di Pulau Jawa, 2020 - 2024

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024a)

Peningkatan skor indeks Pembangunan manusia terus berlangsung. Berdasarkan data di atas, IPM Provinsi DKI Jakarta telah melampaui 80 poin. Indikator ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah mencapai tingkat IPM yang sangat tinggi dengan IPM sebesar 83,08 poin. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian skors IPM tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga termasuk dalam daerah dengan IPM sangat tinggi dengan IPM sebesar 81,55. Sejak tahun 2021, IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam kategori "sangat tinggi". Ini berarti bahwa dua dari enam provinsi di Pulau Jawa kini mempunyai tingkat IPM "sangat tinggi".

IPM yang memiliki nilai lebih tinggi dapat terkait dengan penurunan kemiskinan, karena individu lebih mungkin untuk keluar dari kemiskinan ketika mereka memiliki akses ke layanan penting dan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan ekonomi. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah

seringkali menandakan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang terus-menerus, karena mencerminkan akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi. Masyarakat yang berada di wilayah IPM rendah mungkin akan menghadapi tantangan seperti kesehatan yang buruk, kesempatan pendidikan yang terbatas, dan pendapatan yang rendah. Kesulitan-kesulitan ini seringkali menjebak mereka dalam lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan, sangat penting untuk mengatasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap skor IPM yang rendah, termasuk berinvestasi dalam layanan kesehatan, meningkatkan sistem pendidikan, dan merangsang pembangunan ekonomi.

Mengingat pencapaian skor IPTIK yang relatif tinggi, investasi asing yang signifikan, dan peraihan skor IPM yang sangat tinggi, eksplorasi menyeluruh mengenai dampak faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan sangatlah penting. Oleh karena itu, para peneliti telah mendedikasikan diri untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kemiskinan, termasuk Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, investasi asing, dan Indeks Pembangunan Manusia. Studi ini diberi judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian penelitian terdahulu, permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia Terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
2. Mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
3. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara teoritis serta memperluas pemahaman bagi para pembaca mengenai pengaruh Indeks

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penanaman Modal Asing, serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini memiliki nilai guna sebagai bahan informasi dan rujukan pembaca mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Pulau Jawa.

b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh tambahan wawasan terkait permasalahan kemiskinan, determinannya, dan implikasi kemiskinan di wilayah Pulau Jawa

